

DEKLARASI JANJI KINERJA, OMBUDSMAN MALUKU AJAK SELURUH PEGAWAI KEMENKUMHAM MALUKU SALING BERSINERGI.

Rabu, 12 Januari 2022 - Oktavuri Rilien Prasmasari

Ambon - Semua pihak diharapkan memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku, Hasan Slamet saat menghadiri dan menandatangani kegiatan Deklarasi Janji Kinerja bersama dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Andi Nurka serta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal yang dilangsungkan di Aula Kantor Wilayah pada hari Selasa (11/1/2022).

Dalam sambutannya, Hasan mengungkapkan bahwa Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Menjadi perhatian kita bersama bahwa Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan," ucap Hasan.

Hasan melanjutkan, perencanaan ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang kemudian diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, untuk kemudian dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional. Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses," pungkas Hasan.

Oktavuri Rilien Prasmasari.

Humas Ombudsman Maluku.